

BAB II

KONTEKS NASIONAL DAN LOKAL YANG MEMEPENGARUHI PERKEMBANGAN RRI BANDUNG TAHUN 1971-1983

2.1. Kondisi Indonesia Tahun 1971-1983

2.1.1. Kondisi Politik

Periode ini sangat penting untuk memahami perkembangan Radio Republik Indonesia (RRI) Bandung, mengingat kuatnya pengaruh dinamika politik Orde Baru terhadap berbagai institusi negara, termasuk media massa.

Tahun 1971 hingga 1983 adalah masa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, atau biasa disebut dalam masa pemerintahan Orde Baru. Meskipun pada dasarnya Orde Baru dimulai pada tahun 1966 ketika diumumkannya Surat Perintah Sebelas Maret, hingga berakhir tahun 1998 saat penurunan presiden Soeharto.³⁴ Pemilihan periode tahun 1971-1983 karena pada tahun ini adalah masa konsolidasi pemerintah Orde Baru yang menancapkan kontrol kuat untuk mewujudkan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi terhadap berbagai institusi negara, termasuk lembaga legislatif, yudikatif, serta media masa.³⁵

Tahun 1971 terjadi pemilihan umum pertama pada masa Orde Baru. Sebelumnya pemilihan umum ini direncanakan pada tahun 1968, seperti yang sudah diperintahkan dalam Ketetapan MPRS No. IX/MPRS 1966. Akan tetapi, karena adanya pertimbangan politik dan keamanan, pemilu baru dilaksanakan di tahun 1971.³⁶ Pemilu tahun 1971 terjadi didasari oleh Undang-Undang No.15 Tahun 1969, dengan prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia.³⁷ Partai yang mengikuti pemilu di tahun tersebut telah disepakati melalui Keputusan Presiden No.3 Tahun 1970, diantaranya NU, PARMUSI (Partai Muslimin Indonesia), PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia), PERTI (Persatuan Tarbiyah Islamiyah), PNI

³⁴ Aman, *op.cit.*, hlm 78.

³⁵ Rummyati. (2023) Evolusi Sistem Pemilu Masa Orde Baru (1966-1998). *Jurnal Pendidikan Sejarah*. 11(1), hlm 25.

³⁶ Arin, K, *loc.cit.*

³⁷ Pemilu 1971. kpu.go.id

(Partai Nasional Indonesia), Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai MURBA (Musyawarah Rakyat Banyak), dan IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia), serta GOLKAR (Golongan Karya). Meskipun organisasi Golkar menyebutkan dirinya bukan bagian dari partai politik, namun pada praktiknya sama dengan Partai politik lain. Hingga akhirnya, pemilu tahun ini menjadi titik awal dominasi Golongan Karya yang memperoleh 236 dari 360 kursi DPR.³⁸

Tabel 2. 1 Perolehan Suara Pada Pemilu 1971

No	Partai	Suara	%	Kursi
1	Golkar	34.348.673	62,82	236
2	NU	10.213.650	18,68	58
3	Parmusi	2.930.746	5,36	24
4	PNI	3.793.266	6,93	20
5	PSII	1.308.237	2,39	10
6	Parkindo	733.359	1,34	7
7	Katolik	603.740	1,10	3
8	Perti	382.309	0,69	2
9	IPKI	338.403	0,61	-
10	Murba	48.126	0,08	-
	Jumlah	54.669.509	100,00	360

Sumber : Hasan, Yunani. Situasi Politik dan Ekonomi Pada Awal Pemerintah Orde Baru. Jurnal Forum Sosial. Vol. 7 (1). 2014. Dapat diakses <https://repository.unsri.ac.id/25161/2/Isi%20%2821%29.pdf>

Pemilu tahun 1971 telah dilaksanakan, pemerintah melakukan penyederhanaan politik dengan cara menggabungkan (Fusi) dari sejumlah partai.³⁹ Menurut Arin Kusumaningrum, penyederhanaan ini dilakukan dengan alasan “banyaknya partai tidak akan memudahkan dalam pembangunan nasional dan Peran atau fungsi partai dalam memfokuskan pada stabilitas politik yang dibangun oleh pemerintah Orde Baru akan semakin melemah”. Permasalahan banyaknya partai bukan terjadi

³⁸ Arin, K, *op.cit.*, hlm. 3.

³⁹ Hedra, P. (2018). Orde Baru. Kalimantan Barat: Derwati Press, hlm. 11.

antara partai politik, namun persaingan dalam tubuh politik itu sendiri, seperti perebutan kekuasaan ataupun posisi jabatan yang strategis di dalam struktur kepemimpinan partai. Persaingan dalam tubuh partai politik antara pemimpin partai merupakan bagian alami dalam politik. Meskipun bisa membawa dampak positif jika dikelola dengan baik, namun, persaingan ini dapat merusak stabilitas dan efektivitas partai itu sendiri.

Penyederhanaan partai dilakukan melalui sidang umum MPR 1973, dari sembilan partai menjadi dua partai politik, yaitu PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dan PDI (Partai Demokrasi Indonesia). Partai yang tergabung dalam PPP berasal dari empat partai Islam di antaranya Nahdatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Persatuan Tarbiyah Islam (Perti), dan Partai Sarekat Islam (PSI). Sementara Partai yang tergabung dalam PDI terdiri dari, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katholik, Partai Murba, dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).⁴⁰

Kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru di tahun 1971 mulai diterapkan di beberapa bidang. Selain penyederhanaan partai, pemerintah melakukan kebijakan politik pada segi media atau pers. Kontrol negara terhadap media diperkuat melalui regulasi pers Undang-Undang No.11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers. Peraturan ini dijalankan oleh Departemen Penerangan dan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB), isinya berupa menjanjikan kebebasan pers, namun pada praktiknya diikuti oleh pembentukan sistem perizinan ketat seperti Surat Izin Terbit (SIT), Surat Izin Cetak (SIC), dan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUUP).⁴¹

Hubungan pemerintah dan pers pada tahun 1970-an penuh ketegangan, ditandai dengan penutupan dan penghentian penerbitan pers atau disebut dengan istilah pembredelan terhadap media massa yang melakukan pelanggaran pada ketentuan Undang-Undang. Pers pada kurun waktu ini berdiri bersama masyarakat untuk mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah. Pada bulan Juli 1971 terjadi

⁴⁰ Arief, H. Perkembangan Partai Politik Pada Masa Orde Baru (1966-1998). *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasii*. Vol.17 No,2 (2018), hlm 159.

⁴¹ David, T. H, *loc.cit*.

pembredelan media *Harian Kami* dan *Duta Masyarakat*. Pemerintah mencabut surat izin sementara karena melanggar aturan yang seharusnya saat itu seluruh media tidak boleh memberitakan seputar pemilihan umum sepanjang berlakunya Minggu Tenang. Tahun 1973, terjadi pencabutan Surat Izin Cetak oleh KOPKAMTIB terhadap media *Sinar Harapan* selama delapan hari. Hal tersebut terjadi karena, dianggap membocorkan rincian RAPBN tahun 1973-1974 sebelum pengumuman resmi presiden kepada DPR.⁴²

Tahun 1974 terjadi sebuah peristiwa yang besar bagi Indonesia, yang dikenal sebagai peristiwa MALARI (Mala Petaka Lima Belas Januari). Peristiwa tersebut memiliki beberapa faktor penyebab, dalam aspek politik peristiwa MALARI terjadi karena adanya persaingan di dalam tubuh pemerintahan, khususnya antara Soemitro sebagai Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) yang merangkap sebagai Wakil Panglima ABRI dan Ali Moertopo sebagai Asisten Pribadi (Aspri) Presiden yang merangkap juga sebagai Kepala Operasi Khusus (Opsus). Persaingan keduanya seringkali melibatkan upaya memperkuat posisi masing-masing dan memperlemah posisi lawan. Faktor kedua adalah penolakan terhadap dominasi perusahaan asing, terutama dari Jepang yang dipicu oleh pemberlakuan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA). Kebijakan ini menuai banyak kritik karena dianggap merugikan pengusaha pribumi. Dominasi investasi dari Jepang menjadi sasaran utama kemarahan publik karena dinilai hanya mementingkan keuntungannya sendiri.⁴³

Peristiwa MALARI yang berakar dari ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, berdampak pada sejumlah media. Sebelum terjadinya peristiwa MALARI, beberapa pers mengkritik pemerintah diantaranya pertama, mengenai Asisten Pribadi Presiden (ASPRI) yang dinilai hanya membuat Indonesia terlilit hutang dan ketergantungan modal asing terutama Jepang. Kedua, mengkritik tentang kegagalan kinerja BULOG yang belum bisa mengatasi kelangkaan beras di beberapa daerah. Ketiga, kritik dalam isu proyek TMII (Taman Mini Indonesia Indah) yang diumumkan oleh Ibu Tien Soeharto dianggap

⁴² David, T. H, *op.cit.*, hlm 38.

⁴³ Asas, L., et al. (2013). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Peristiwa Malapetaka 15 Januari (MALARI) 1974. *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah*. 1(2), hlm 27.

sebagai proyek yang menghambur-hamburkan uang. Keempat, isu penanaman modal yang didominasi oleh Jepang merugikan rakyat Indonesia.⁴⁴ Beberapa minggu kemudian setelah terjadinya peristiwa MALARI, 12 Penerbitan kehilangan surat izin terbit dan surat izin cetak diantaranya, di Jakarta *Nusantara*, *Mingguan Senang*, *KAMI*, *Indonesia Raya*, *Abadi*, *The Jakarta Times*, *Pemuda Indonesia*, *Majalah Berita Minggu Ekpres*, *Pedoman*, di Surabaya *Suluh Berita*, di Bandung *Mahasiswa Indonesia*, di Ujung Pandang *Indonesia Pos*.⁴⁵

Pemilhan umum selanjutnya dilaksanakan pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Tahun 1977, pemerintah bersama DPR mengeluarkan UU No. 3 tahun 1975 untuk mengatur penyederhanaan partai, sehingga ditetapkan bahwa terdapat 2 partai yang ikut dalam pemilu tahun 1977 yaitu PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dan PDI (Partai Demokrasi Indonesia), serta organisasi Golkar. Hasil dari pemilu 1977, sebanyak 232 kursi dimenangkan oleh Golkar, 99 kursi untuk PPP, dan 29 kursi untuk PDI. Sementara pemilu tahun 1982 yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei, Golkar gagal memperoleh kemenangan di wilayah Aceh. Akan tetapi, di Jakarta dan Kalimantan, Golkar berhasil mendapat kemenangan. Hingga hasil akhir pemilu tahun 1982, Golkar memperoleh tambahan kursi sebanyak 10 kursi, sementara PPP dan PDI kehilangan 5 kursi.⁴⁶

Tahun 1980-an, satu persatu media publikasi juga mulai dibredel. Bulan Januari 1983, majalah berita *Dwi Minggu Expo* dicabut surat izin oleh pemerintah karena menerbitkan artikel mengenai “100 Milioner Indonesia” yang isinya mengenai nama orang-orang yang dekat di lingkaran Orde Baru. Bulan April tahun 1983, *Jurnal Ekuin* (Ekonomi, Keuangan dan Industri) izin penerbitannya dicabut karena mengungkap soal penurunan harga dasar ekspor minyak oleh pemerintah.⁴⁷

⁴⁴ M Rifki, J., et al. (2022). Pemberedelan Pers Pasca Peristiwa Malapetaka 15 Januari (MALARI 1974). *Bihari: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah*. 5(1), hlm. 38.

⁴⁵ David, T. H, *op.cit.*, hlm 37

⁴⁶ Hedra, Permana, *loc.cit.*

⁴⁷ David, T. H, *op.cit.*, hlm 40

2.1.2. Kondisi Sosial Tahun 1971-1983

Kondisi sosial merupakan suatu keadaan yang berhubungan dengan situasi masyarakat, baik dalam pendidikan, ekonomi, atau kesehatan.⁴⁸ Pada masa Pemerintah Orde Baru dihadapkan dengan berbagai permasalahan dalam kesejahteraan sosial, dengan sensus jumlah penduduk di tahun 1971 mencapai 119,2 juta jiwa. Permasalahan tersebut meliputi inflasi kurang lebih 650% pada awal tahun 1966, tingginya populasi di wilayah kota, serta pendidikan dan kesehatan yang masih rendah.⁴⁹

Proses penyelamatan keuangan negara dan pengamanan bahan pokok rakyat dalam mengatasi inflasi, pemerintah Orde Baru melakukan stabilisasi dalam mengendalikan inflasi dan rehabilitasi pada sarana dan prasarana ekonomi untuk mewujudkan demokrasi ekonomi. Program stabilisasi yang mencegah laju inflasi berhasil dilakukan, namun harga kebutuhan bahan pokok naik. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi pemerintah diubah menjadi pengendalian ketat terhadap sandang, pangan, dan kurs valas. Kebutuhan dalam menjaga stabilitas harga pangan pasca inflasi, dengan fakta mayoritas penduduk Indonesia saat itu bergantung pada pertanian, menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas utama dalam kebijakan pembangunan nasional.⁵⁰

Kebijakan pembangunan nasional pada pelita I, pemerintah menargetkan tahun 1974 produksi beras bisa meningkat hingga 47%. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah berupaya melakukan modernisasi pertanian dengan nama Revolusi Hijau, yang menuntut perubahan besar dalam praktik pertanian. Di pulau Jawa, untuk meningkatkan produksi beras dilakukan dengan cara intensifikasi khusus pertanian. Cara tersebut berupa penggunaan teknologi biologi dan kimia atau penggunaan pupuk, bibit unggul, pestisida, dan herbisida, serta perubahan dalam teknologi pada traktor dan kombinasi manajemen air irigasi dan drainase. Di luar pulau Jawa, pemerintah melakukan ekstensifikasi khusus pertanian. Cara tersebut

⁴⁸ Basrowi., & Siti, J. (2010). Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*.7(1), hlm 62.

⁴⁹ Hedra, P, *op.cit.*, hlm. 19 dan 29.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 30.

dilakukan pada penambahan area persawahan dan lahan pertanian dengan mengonversi hutan-hutan yang tidak produktif.⁵¹

Upaya pemerintah dalam menjalankan pembangunan pertanian sukses dilakukan. Akan tetapi, populasi di daerah kota semakin meningkat khususnya di wilayah pulau Jawa. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 1971 penduduk yang tinggal didaerah kota sebanyak 17,3%, sementara tahun 1962 sebanyak 14,8%.⁵² Peningkatan jumlah penduduk tersebut membentuk sebuah kebijakan transmigrasi yang bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk khususnya di Pulau Jawa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam manusia dari daerah baru.⁵³ Program ini dilakukan secara bertahap dalam program pembangunan (Pelita I-VI) sejak tahun 1969-1999, dengan sasaran daerah seperti Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, serta beberapa daerah di Sulawesi dan Kalimantan.⁵⁴

Pemerintah menancapkan kendali melalui sektor sosial dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Permasalahan pada bidang pendidikan yang dihadapi pemerintah Orde baru yaitu pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas, efektifitas dan efisiensi, serta relevansi pendidikan dengan pembangunan nasional.⁵⁵ Pendidikan masa Orde Baru selalu berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, dengan dibentuknya P4 (Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) setiap siswa dan warga negara harus patuh terhadap negara tanpa dikenalkan hak-haknya. Relevansi pada bidang pendidikan, muncul dalam kebijakan Pelita I-V. Pada pelita I, dibentuk kebijakan khusus untuk meberantas buta huruf di Indonesia. Di akhir kebijakan pelita II, pemerintah mendirikan

⁵¹ Arin, Kusumaningrum, *op.cit.*

⁵² Hedra Permana, *op.cit.*

⁵³ Heru, Susetyo, dkk. Kebijakan Transmigrasi Dalam Kerangka Kesejahteraan Sosial dan Ketahanan Nasional di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Soisal*. Vol 25 (2). 2025, hlm 2.

⁵⁴ Stella, Vania. Analisis Terhadap Progrm Transmigrasi Serta Pengembangan Wilayah di Unit Pemukiman Transmigrasi Geumpang II SP 3 Provinsi Aceh. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2(2). 2021, hlm 114.

⁵⁵ As'ad, Muzammil. (2016). Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Pendidikan Dari Orde Lama Sampai Orde Baru. *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*. 2(2), hlm, 194.

beberapa sekolah dasar untuk mendukung pemerataan pendidikan dengan menyelenggarakan wajib belajar 6 tahun.⁵⁶

Di bidang Kesehatan pemerintah menjalankan program Keluarga Berencana (KB). Selain bisa meningkatkan kesehatan khususnya para ibu, program KB bisa menjadi salah satu upaya dalam mengatasi pertumbuhan jumlah penduduk dalam mengatasi jumlah kelahiran bayi.⁵⁷ Program KB dilaksanakan secara nasional pada era 80-an dengan tujuan demografis untuk membatasi jumlah penduduk, yang kemudian memunculkan slogan “Dua anak Cukup”.⁵⁸

Periode 1971 hingga 1983 merupakan fase penting dalam upaya konsolidasi kekuasaan Orde Baru yang berlandaskan stabilitas. Selain penancapan kontrol politik melalui pemilihan umum yang didominasi oleh organisasi Golkar. Pemerintah juga menerapkan kebijakan di berbagai sektor. Di bidang sosial terdapat program seperti penyederhanaan sistem kepartaian, transmigrasi, serta Keluarga Berencana (KB) untuk pemerataan penduduk dan pengendalian demografi. Bidang ekonomi, memfokuskan pada rehabilitasi dan pembangunan melalui Repelita serta keterbukaan terhadap modal asing, meskipun menimbulkan ketidakpuasan seperti tercermin dalam peristiwa Malari. Sementara itu, sektor pendidikan difokuskan pada pemerataan dan ideologisasi melalui program seperti wajib belajar. Keseluruhan kebijakan ini membentuk lanskap sosial, politik, dan ekonomi yang terpusat dan terkontrol, di mana media massa, termasuk Radio Republik Indonesia Bandung beroperasi dibawah pengaruh kuat dari dinamika dan agenda pembangunan pemerintah.

2.1.3. Kondisi Budaya

Kondisi budaya pada tahun 1971-1983 dapat dilihat oleh adanya kontrol negara yang kuat dan penekanan pada agenda pembangunan. Pemerintah memandang budaya bukan hanya sebagai ekspresi seni, melainkan sebagai alat untuk mencapai stabilitas dan keseragaman ideologi untuk menopang program

⁵⁶ Megridha, L. (2023). Pendidikan Zaman Orde Baru: Upaya Melagengkan Kekuasaan Soeharto. *Phinisi Integration Review*. 6(2), hlm. 240.

⁵⁷ Siti, N., et al. (2025). Kebijakan Pada Masa Orde Baru dalam Perspektif Historis. *Jurnal Pendidikan Nusantara*. 1(12), hlm. 267.

⁵⁸ Puri, K.D. P., et al. (2019). Kelembagaan dan Capaian Program Keluarga Berencana (KB): Dari Era Sentralisasi ke Desentralisasi. *Jurnal Kependudukan Indonesia*. 14(1), hlm. 6.

pembangunan ekonomi nasional. Melalui kebudayaan, bangsa Indonesia dapat meningkatkan produksi ekonomi yang beradaptasi dengan teknologi dan ilmu-ilmu modern. Hal tersebut menjadikan pemerintah Orde Baru menjalankan budaya komando (*Command Culture*) yang secara rasionalitas kebijakan pemerintah terhadap budaya selalu bertujuan pada pembangunan.⁵⁹

Bentuk – bentuk kesenian daerah diubah sebagai sarana komunikasi antara pemerintah Orde Baru dengan masyarakat umum. Perubahan mendasar tersebut mencakup tiga mekanisme utama. Pertama adanya penyisipan slogan dan pelajaran pembangunan. Seorang aktor atau penyanyi harus memasukan pesan pemerintah kedalam naskah atau dialog, dan lirik lagu mereka yang nantinya akan dipastikan oleh Militer dan Direktorat Kebudayaan. Kedua, pemerintah Orde Baru mencegah tema-tema yang memiliki unsur politik atau yang nantinya menimbulkan diskusi terkait politik. Ketiga, proses luas perbaikan, mengurangi waktu pertunjukan, dengan menggunakan bahasa Indonesia dan mengubah unsur-unsur yang tidak dianggap bermoral. Sebagai contoh dalam wayang golek, seorang dalang menjaga keseimbangan antara tekanan negara yang membutuhkan dukungan rakyat dengan harapan dan keinginan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan gaya pertunjukan dalang yang berbeda itu untuk kepentingan negara, dan pesan-pesan pembangunan dimasukan ke dalam pertunjukan bersamaan dengan lolucon dan kritik yang diinginkan masyarakat.⁶⁰

Diplomasi kebudayaan pada masa pemerintahan Orde Baru adanya manifestasi dalam agenda politik luar negeri, meskipun sebagian besar politik luar negeri berfokus pada kepentingan nasional, pembangunan ekonomi, dan menjaga stabilitas politik dalam negeri. Periode 1978-1988 menteri luar negeri Kusuma Atmaja memberikan sebuah ide tentang diplomasi kebudayaan pada tahun 1983. Kemudian di tahun 1984, didirikan sebuah Yayasan Nusantara Jaya yang berperan dalam praktek diplomasi pada bidang kesenian melalui sebuah pameran.

⁵⁹ Tod , J. (2019). *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indoneisa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 143 dan 205.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 160.

Perkembangan globalisasi yang semakin pesat menjadikan Indonesia dikenal di dunia.⁶¹

2.2. Kondisi Kota Bandung Tahun 1971-1983

Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat mengalami perkembangan pesat seiring dengan kebijakan pembangunan nasional masa Orde Baru. Tahun 1971, Pemerintah Kota Bandung menerbitkan *Master Plan* Kota Bandung yang merumuskan fungsi kota sebagai pusat pemerintahan, perguruan tinggi, perdagangan, industri, serta kebudayaan dan pariwisata.⁶² Masterplan ini menjadi dasar bagi berbagai program pengembangan infrastruktur kota, termasuk pembangunan jalan raya, kawasan industri dan perumahan untuk mendukung urbanisasi yang meningkat.

Secara administratif, Kota Bandung berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bandung di sebelah utara, timur, dan selatan, serta berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bandung yang saat ini menjadi kota Cimahi di sebelah barat.⁶³ Dalam periode 1971-1983, Bandung di pimpin oleh walikota, R. Otje Djoendjoenan (1971-1976), dan R Husein Wangsaatmadja (1978-1983).⁶⁴ Kepemimpinan tersebut berlangsung pada pemerintahan Orde Baru yang menekankan stabilitas politik dan pembangunan daerah.

Selama periode pemerintahan Presiden Soeharto, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kota Bandung memiliki peningkatan. Hal tersebut menunjukkan, bahwa arus migrasi dari luar Kota Bandung ke Kota Bandung semakin bertambah dari tahun ke tahun. Meskipun hal itu menandakan bahwa kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah Kota Bandung berhasil menarik pendatang untuk melakukan aktivitas di Kota Bandung,⁶⁵ urbanisasi ini menjadi tantangan utama penduduk Kota Bandung selama dekade 1970-an. Migran tersebut umumnya tidak memiliki keterampilan formal dan tinggal di pemukiman informal, sehingga

⁶¹ Rizki, D N., et al. Diplomasi Kebudayaan Indonesia: Era Orde Baru Hingga Kini. *JISIERA: The Journal of Islamic Studies and International Realties*. Vol 3. 2018., hlm48-49.

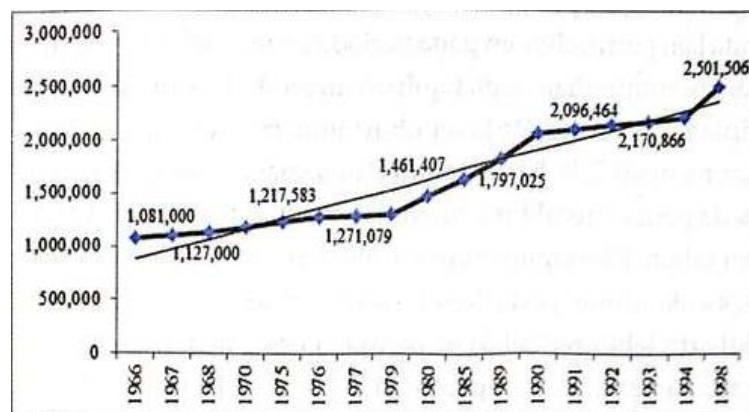
⁶² Nandang, R. (2010). Sejarah Kota Bandung dari “BERGDESSA” (Desa Udik) Menjadi Bandung “Heurin Ku Tangtung” (Metropolitan). *Jurnal Patanjala*. 2(2), hlm. 287.

⁶³ Yan, N., et al. (2025). Sejarah Perkotaan Kota Bandung. *Journal of Literature Review*. 1 (1), hlm. 58.

⁶⁴ Astrid, A. Mengenal Walikota Bandung Dari Masa Ke Masa. *Info Bandung*, hlm. 1.

⁶⁵ Nina, H. L., *op.cit.*, hlm 283-284.

bermunculan kawasan kumuh atau “kampung kota” di pinggiran.⁶⁶ Perkembangan kawasan pinggiran kota Bandung menjadi fenomena penting. Kawasan Kiaracondong, Gedebage dan Antapani mengalami pertumbuhan cepat sebagai area pemukiman pendatang yang belum tertata.⁶⁷



Gambar 2. 1 Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Bandung Tahun 1966-1998

Sumber: Lubis, N.H., dkk. (2016). *Sejarah Kota Bandung*. Bandung: Pemerintah Kota Bandung

Aktivitas para pendatang biasanya dalam bentuk ekonomi, pendidikan, maupun kegiatan sosial lainnya.⁶⁸ Keberadaan lembaga-lembaga tinggi seperti ITB, UNPAD, IKIP Bandung, dan Universitas Islam Bandung menjadikan kota ini sebagai pusat intelektual yang dinamis. Meskipun kampus tersebut di bawah pengawasan ketat melalui kebijakan NKK/BKK, mahasiswa Bandung tetap aktif menyuarakan pendapat yang membahas berbagai isu sosial dan politik. Peran kalangan intelektual dalam membentuk opini publik turut memberi nuansa tersendiri dalam perkembangan media lokal.⁶⁹

Ditengah dinamika urbanisasi, peningkatan laju pertumbuhan penduduk, dan munculnya kawasan kumuh yang menjadi tantangan utama di Kota Bandung.

⁶⁶ Fauzi, M. R. & Abdullah, M. N. A. (2024). Dampak Urbanisasi Terhadap Peningkatan Kawasan Kumuh di Kota Bandung. *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara* 3, hlm 33–34

⁶⁷ Iwan, S. (2022). Migrasi Penduduk Menuju Daerah Pinggiran Kota Bandung dan Implikasinya terhadap Kualitas Lingkungan Permukiman. *Jurnal Geografi Gea* 10, no. 2, hlm 3

⁶⁸ Nina Herlina L., *loc.cit.*

⁶⁹ Tedi, N. (2020). Gerakan Mahasiswa dan Kebijakan NKK/BKK Tahun 1970-an di Bandung. *Jurnal Patanjala*, Vol. 12 No. 2, hlm. 225–234.

Tahun 1971 menjadi titik awal karena melalui Master Plan Kota Bandung, arah pembangunan ditetapkan secara lebih terstruktur. Radio Republik Indonesia (RRI) Bandung memegang peran strategis untuk memastikan agenda pembangunan nasional dan stabilitas dapat tersampaikan secara efektif kepada masyarakat majemuk ini. Fungsi RRI Bandung sebagai penghubung antara pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan RRI wilayah Bandung bukan hanya menyiarkan acara, melainkan jadi alat utama dalam mensosialisasikan berbagai program pembangunan.